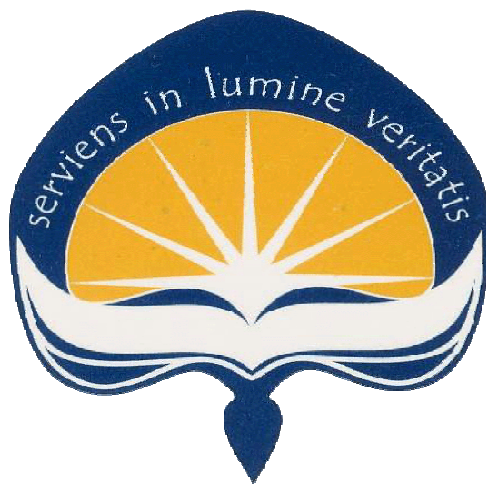


PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENETAPKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh:

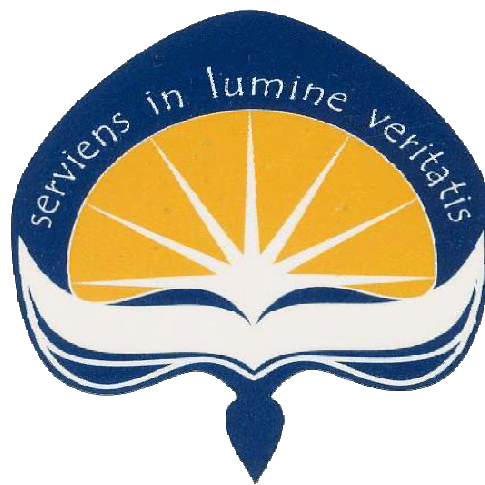
INDA WIJAYANTO

NPM	:	01 05 07694
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2012

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENETAPKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh:

INDA WIJAYANTO

NPM	:	01 05 07694
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2012

HALAMAN PERSETUJUAN

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENETAPKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh:

INDA WIJAYANTO

NPM	:	01 05 07694
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 26 November 2012**

Dosen Pembimbing,



G. Aryadi. SH. MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Sripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Desember 2012
Tempat : Ruang Bapak Aryadi di Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge. SH. M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi. SH. MH.

Anggota : Dr. G. Widiartana. SH. M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

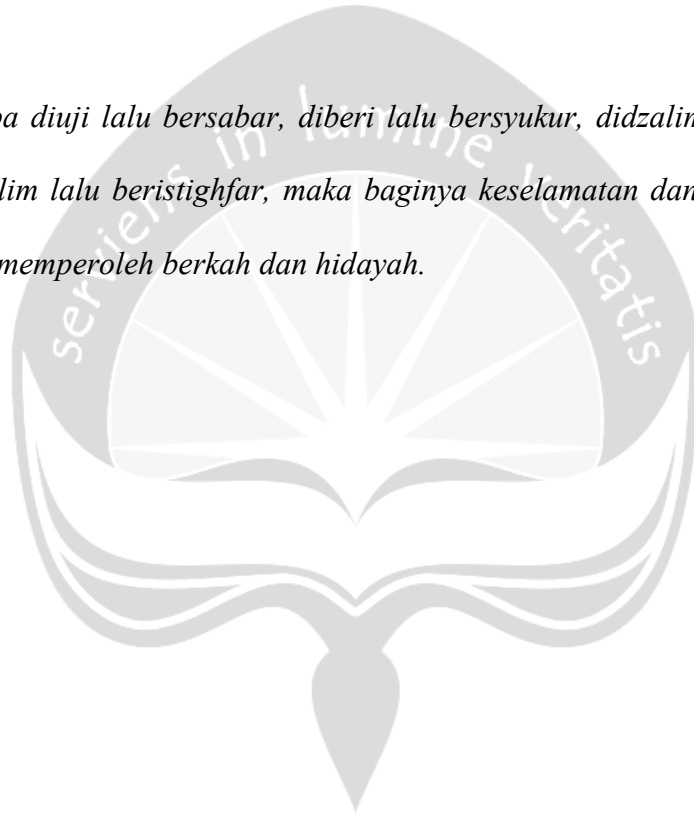


Dr. Hari Murti Widiyastuti. SH. M.Hum.

MOTTO

Disaat merasa paling bahagia, percaya bahwa ada sesuatu yang harus anda lakukan di dunia. Sejauh anda dapat membuat penderitaan orang lain menjadi lebih manis, hidup tidak akan sia-sia.

Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, didzalimi lalu memaafkan, berbuat dzalim lalu beristighfar, maka baginya keselamatan dan merekalah orang-orang yang memperoleh berkah dan hidayah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karuniaNya, serta junjungan Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi (penulisan hukum) yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENETAPKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini selesai berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak dan untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti SH, M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Bapak G. Aryadi SH, MH, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Y. Sri Pudyatmoko SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.
4. Kepada kedua orang tua saya, terima kasih atas pengorbanan, motivasi dan doa yang tulus kepada penulis selama ini, terutama atas segala kesempatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada seluruh rekan-rekan atau alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Kepada para sahabat, rekan-rekan seperjuangan para musisi, para gitaris jogja, jogja blues forum, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 26 November 2012

Penulis

ABSTRACT

The letters of termination provisions for prosecution of suspected corruption cases always invites controversy, debate, and lead to negative perceptions of the performance of the law enforcement agencies, particularly the attorney. The letters of termination provisions for prosecution has always been the oversight and allegations that prosecutors are not serious to resolve corruption cases. In the eyes of the public who wish to be prosecuted corruption and condemnation, then the termination decrees granting the prosecution regarded as an act injuring the public sense of justice and hope in the fight against corruption. This type of research is the study of normative legal norm applicable law. Normative legal research is conducted legal research literature by examining library materials that are secondary data. The data used in this study is a secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection study was conducted to study the literature of the legislation related to legal issues this study. Systematics legal writing consists of introduction covers, background issues, the formulation of the problem, purpose of the study, the benefits of research, the concept of limits, systematic legal writing, consideration of the public prosecutor to terminate for prosecution of corruption cases, Bibit-Chandra cases and consideration the prosecutor to terminate the prosecution.

Key words: prosecutor, prosecution, termination prosecution, corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Konsep.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENETAPKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16

2. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	19
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	29
B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk Menetapkan Penghentian Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	53
1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum.....	53
2. Penghentian Penuntutan.....	59
3. Penyampingan Perkara.....	61
C. Penyajian Kasus dan Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	62
a. Kasus Bibit-Chandra.....	62
b. Analisis Kasus Bibit-Chandra.....	67
BAB III PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,



Inda Wijayanto